

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain. Apabila dibandingkan dengan instansi lain, instansi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga politik dari pada lembaga ekonomi. Akan tetapi, sebagaimana bentuk-bentuk instansi lainnya, instansi pemerintah juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi. Instansi pemerintah melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di satu sisi, dan di sisi lain instansi ini harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi seluruh biaya tersebut.

Sebagaimana halnya perusahaan, instansi pemerintah juga berusaha untuk mencegah atau menghindari pemborosan dan hal-hal lain yang dianggap merugikan karena hal-hal demikian akan membawa pengaruh buruk bagi keuangan masing-masing instansi pemerintah. Untuk menjamin adanya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan ini, maka diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan yang tepat dan benar-benar diterapkan dalam instansi tersebut. Sistem akuntansi keuangan dalam sebuah instansi pemerintah merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan, hal ini dikarenakan sistem akuntansi keuangan dapat digunakan sebagai alat pengatur dan

pengendalian untuk seluruh kegiatan keuangan. Penerapan sistem akuntansi keuangan bertujuan untuk mengatur dan melindungi kekayaan atau aset milik instansi yang bersangkutan. Dengan diterapkan sistem akuntansi keuangan diharapkan semua aktifitas instansi pemerintah dapat dijalankan dengan efisien, sesuai dengan kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah.

Akuntansi keuangan daerah merupakan suatu hal yang baru dalam akuntansi pemerintahan. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sector publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang me"reformasi" berbagai hal termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan akuntansi keuangan daerah merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah, karena akuntansi keuangan daerah dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, sehingga pemerintah terus melakukan perbaikan - perbaikan kebijakan.

Penerapan keuangan daerah telah membawa konsekuensi logis berupa pelaksana penyelenggaraan pemerintah berdasarkan pemerintahan yang sehat. Pemerintah dan daerah memiliki wewenang untuk sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk peraturan daerah. Salah satunya adalah peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi

pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Sebagai pelaksanaan dari peraturan pemerintah no 24 tahun 2005, maka pemerintah mengeluarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas kedua peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dengan diterbitkan permendagri nomor 59 tahun 2007 menandai bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi daerah dan permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah salah satunya yaitu dengan munculnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang (Standar Akuntansi Pemerintahan) dimana dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP berbasis akrual, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah TA 2010 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan perlu

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggung jawabkan, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang. Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pemerintah daerah.

Basis kas dalam Laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima direkening kas umum daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Basis akrual untuk neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian/ kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa pemerintahan saat kas/setara kas diterima/dibayarkan.

Akuntansi juga merupakan sebuah siklus, artinya terdiri dari beberapa tahapan tertentu dan setelah selesainya tahap tersebut kegiatan akan berulang kembali sesuai dengan urutan tersebut. Dalam sistem akuntansi keuangan daerah, contoh inputnya adalah Bukti Memorial dan Surat Perintah Membayar. Adapun tahap-tahap yang ada dalam siklus akuntansi keuangan daerah adalah : Mendokumentasikan transaksi keuangan kedalam buku dokumen transaksi dan melakukan analisis transaksi, Jurnal

transaksi, ini merupakan media pencatatan transaksi secara urut waktu, Pencatatan transaksi, menjurnal dan kemudian posting ke Buku Besar, Membuat daftar saldo, yaitu daftar rekening-rekening beserta saldo yang menyertainya. Saldo rekening diambil angkanya dari saldo terakhir yang ada disetiap rekening buku besar, Membuat jurnal penyesuaian agar laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan yang benar dan wajar, pada rekening tertentu dalam kelompok pendapatan, belanja, pembiayaan dan neraca dilakukan penyesuaian sebagai akibat timbulnya hak dan kewajiban yang diperhitungkan pada tahun anggaran berkenaan, Menyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu neraca saldo yang disusun setelah pembuatan jurnal-jurnal penyesuaian, Membuat laporan keuangan, yaitu hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan, Membuat jurnal penutup. Jurnal penutup rekening pendapatan dan biaya pada akhir periode akuntansi akan ditransfer ke dalam rekening temporer. Tahap akhir membuat neraca saldo setelah penutupan. Seperti halnya neraca saldo yang lain, neraca saldo setelah tutup buku juga berisi ringkasan saldo rekening-rekening. Hanya saja, saldo tersebut adalah saldo setelah pembuatan jurnal penutup. Basis kas untuk penyajian laporan realisasi anggaran, pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima dari kuasa bendahara umum daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kuasa bendahara umum daerah. Sedangkan basis akrual untuk neraca bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya

transaksi atau diperolehnya hak atas asset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh kas daerah.

Adapun proses akuntansi yang dilakukan pada Kantor Camat Tilatang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat adalah dengan membuat Buku Kas Umum. Dimana semua transaksi yang terjadi baik penerimaan maupun pengeluaran kas dicatat dalam Buku Kas Umum. Kemudian dari Buku Kas Umum yang dibuat oleh Kantor Camat Tilatang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat membuat Laporan SPJ Belanja Fungsional, kemudian dalam membuat Laporan Keuangan yang berpedoman dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menggunakan basis modifikasian kas menuju akrual yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang formatnya terdiri dari pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, belanja daerah, belanja operasi terdiri atas belanja karyawan dan belanja barang dan jasa, belanja modal terdiri atas belanja peralatan dan mesin serta belanja aset tetap lainnya, belanja tak terduga, transfer, surplus/deficit, pembiayaan yang terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan, (2) Neraca, formatnya terdiri dari aset lancar yang terdiri atas kas dan persediaan. Aset tetap terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan bangunan, aset tetap lainnya, akumulasi penyusutan aset tetap, dana cadangan, aset lainnya, kewajiban terdiri atas kewajiban jangka pendek, uang muka dari kas daerah, ekuitas dana yang terdiri dari ekuitas dana lancar seperti pendapatan yang ditangguhkan, cadangan persediaan dan ekuitas dana investasi yang

diinvestasikan dalam aset tetap, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas dan (5) Catatan Atas Laporan Keuangan .

Kantor Camat Tilatang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat tidak membuat jurnal yang memisahkan antara jurnal penerimaan dan pengeluaran kas, semua transaksi dicatat pada buku kas umum. Kantor Camat Tilatang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat belum membuat jurnal penyesuaian. Karena jurnal penyesuaian merupakan kegiatan pembetulan akuntansi diakhir tahun sehingga pos – pos yang ada di laporan keuangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Serta tidak melakukan pempostingan ke buku besar.

Dalam penyusunan laporan keuangan pada Kantor Camat Tilatang Kaman berbasis pada basis kas (cash basic). Basis kas untuk pengakuan atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana yang disajikan dalam Neraca.

Format yang terdapat dalam neraca pada Kantor Camat Tilatang Kamang terdiri dari aset lancar, aset tetap, aset lainnya, kewajiban dan ekuitas dana, aset lancar hanya ada persediannya, aset tetap disajikan tetapi tidak ada akumulasi dan penyusutannya, ekuitas dana terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana untuk dikonsolidasi.

Format Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di Kantor Camat Tilatang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat, adalah sebagai berikut: Pendapatan daerah, pendapat asli daerah terdiri atas hasil retribusi daerah, belanja daerah serta belanja

operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal terdiri atas peralatan dan mesin, gedung dan bangunan.

Kantor Camat Tilatang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat tidak melakukan penyusutan terhadap aset tetap yang dimiliki, hal ini dapat dilihat dalam Neraca Kantor Camat Tilatang Kamang Kabupaten Agam tahun 2014 dan 2015 pada akun akumulasi penyusutan aset tetap yang nilainya nol (0.00).

Kantor Camat Tilatang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat pada ekuitas dana lancar memasukan pendapatan yang ditangguhkan akan tetapi nilainya nol (0.00) bisa dilihat pada Neraca Kantor Camat Tilatang Kamang Kabupaten Agam tahun 2014 dan 2015.

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan suatu penelitian lebih lanjut dan pembahasan yang menyangkut masalah Analisis dan Interpretasi data keuangan pemerintah daerah dengan mengambil judul:

**“Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Kantor CamatTilatang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat”**

## **B. PerumusanMasalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis membuat perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

**“Bagaimana penerapan akuntansi keuangan daerah pada Kantor Camat Tiltang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan”**

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan akuntansi keuangan daerah pada Kantor Camat Tiltang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat Yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menambah wawasan penulis, khususnya untuk bidang ilmu akuntansi secara umum dan bidang akuntansi keuangan daerah secara khususnya, dimana penulis dapat menilai secara langsung praktek penerapan akuntansi keuangan daerah yang dilakukan oleh Kantor Camat Tiltang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat
- b. Bagi Kantor Camat Tiltang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat hasil penelitian ini merupakan masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan-perbaikan dalam penyempurnaan penerapan akuntansi keuangan daerah.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau bahan referensi terhadap penelitian selanjutnya dengan masalah yang sama pada tempat yang berbeda.

#### **D . Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman tentang skrikpsi ini,maka penulis membagi kedalam enam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I: Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II : Bab ini membahas tentang telaah pustaka yang terkait dengan pembahasan proposal ini antara lain pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Tujuan Akuntansi Keuangan Daerah, Perbedaan Akuntansi Keuangan Daerah dengan Akuntansi Perusahaan, Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pencatatan dan Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah, Elemen-Element Akuntansi Keuangan Daerah.
- BAB III: Bab ini memuat tentang lokasi penelitian, sumber dan jenis data dan cara pengumpulan data serta analisis data.
- BAB IV: Bab ini berisikan tentang gambaran umum Kantor Camat Tilatang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat.
- BAB V: Berisikan hasil pembahasan Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Kantor Camat Tilatang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat yang dilakukan peneliti.

BABVI: Berisikan Kesimpulan dan saran dari semua hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Camat Tilatang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat.

